

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.

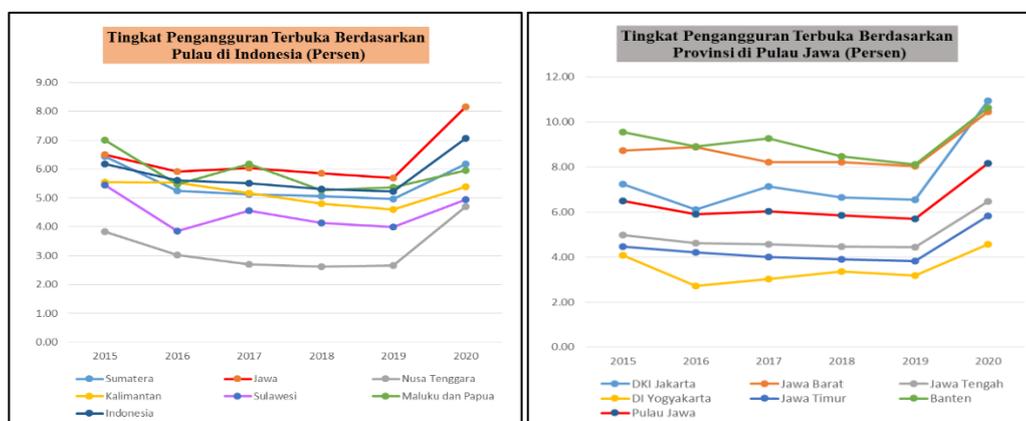
Menurut Keynesian dalam (Karya & Syamsuddin, 2017) menyatakan bahwa *full employment* di mekanisme pasar itu direncanakan dan tidak dapat secara otomatis tercapai. *Full employment* atau lapangan kerja penuh merupakan suatu kondisi dimana suatu perekonomian memanfaatkan sepenuhnya sumber daya produktifnya, sehingga pada saat terjadinya *full employment* setiap angkatan kerja yang ingin bekerja memiliki pekerjaan. Keynesian berpandangan bahwa untuk mencapai *full employment* memerlukan waktu yang cukup lama dan itu semua tergantung pada seberapa besar hambatan yang ada. Oleh karena itu Keynesian berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian itu diperlukan, meskipun perekonomian sudah dalam keadaan *full employment* sekalipun. Mengutip dari (Sukarniati, 2019) campur tangan pemerintah yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja dapat berupa usaha dalam perencanaan dan penempatan bagi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, mengatur hubungan industrial, melakukan permbinaan serta pengawasan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Intervensi pemerintah dalam kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan ini sangat jelas berperan sekali dalam membuat perekonomian di wilayahnya makmur dan membuat masyarakatnya menjadi sejahtera.

Peran pemerintah dapat dimulai dari komponen penting sebuah kegiatan perekonomiannya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah dapat berupaya dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk para pencari pekerja. Hingga pada akhirnya para pekerja tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang berguna untuk pemenuhan hidup mereka sehari-hari. Sebaliknya jika para angkatan kerja yang ingin bekerja ini tidak dapat bekerja, maka mereka bisa menjadi pengangguran yang dapat dengan mudahnya terjat pada belenggu kemiskinan. Penelitian (Rianda, 2020) membuktikan bahwa adanya pengangguran akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi baik dalam kurun waktu berjangka panjang ataupun

berjangka pendek, serta pengangguran akan mendorong kenaikan angka kriminalitas. Di Indonesia (Jojo, Gandhy, Simanullang, & Frasipa, 2019) menggunakan proxy Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyatakan bahwa keadaan TPT berfluktuatif setiap tahunnya, oleh sebab itu kinerja perekonomian di Indonesia pun menjadi belum stabil jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi (Jojo, Gandhy, Simanullang, & Frasipa, 2019)

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, dimana didalamnya terdapat ribuan pulau tersebar di penjuru negeri baik dari pulau yang berukuran besar hingga berukuran kecil. Adapun pulau yang menjadi induk pulau di Indonesia adalah pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Sumatera, pulau Nusa Tenggara, serta pulau Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil laporan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diklasifikasikan menjadi data berdasarkan induk pulau tersebut dapat dilihat selama enam tahun terakhir pulau Jawa mendominasi sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia.

Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Berdasarkan Pulau di Indonesia dan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pulau Jawa memiliki beberapa sumber daya alam yang bermanfaat sebagai penghasil pendapatan daerah serta memiliki sumber daya manusia yang terbilang berkualitas dibandingkan daerah lainnya. Hal ini tidak luput disebabkan akibat pulau Jawa berperan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Indonesia. Oleh karenanya pulau Jawa memiliki pembangunan infrastruktur yang lebih cepat

Charia Roswita, 2022

PENGARUH IPM, PMA, PMDN, DAN TOTAL BELANJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH PROVINSI DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

dan lebih banyak daripada lima induk pulau lainnya sehingga dari segi pembangunan infrastrukturnya tersebut dapat menunjang kegiatan perekonomian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pulau Jawa. Oleh karenanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian di pulau Jawa telah dilakukan demi mewujudkan keadaan *full employment* itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Keynes demi mencapai *full employment* perlu perencanaan karena tidak secara otomatis tercapai dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian itu diperlukan untuk bisa mencapai *full employment* bahkan jika sudah dalam keadaan *full employment* sekalipun campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk bisa memberikan keseimbangan dalam mekanisme pasar.

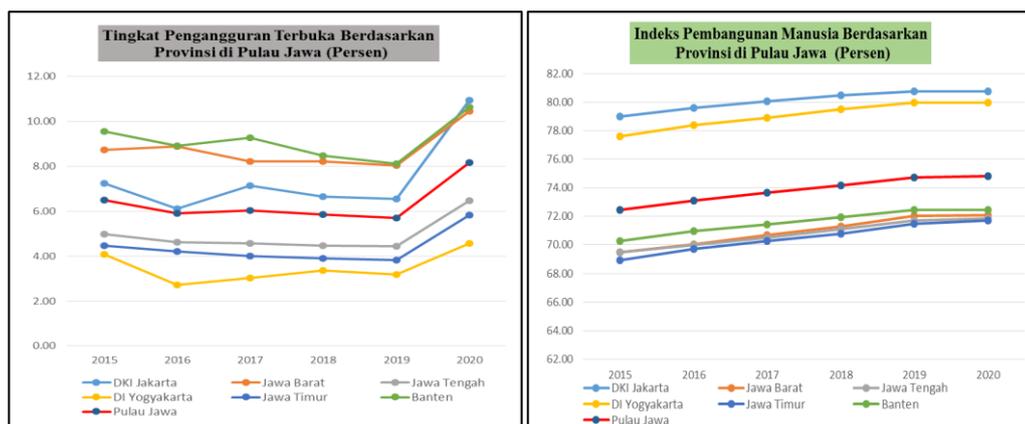
Pada kenyataannya dapat dicermati pada grafik diatas TPT di pulau Jawa mendominasi sebagai pulau dengan TPT tertinggi dan hanya pada tahun 2017 dan tahun 2020 saja menempati posisi kedua tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara teori dan realitas yang ada di pulau Jawa karena banyak dan cepatnya pembangunan yang ada di pulau Jawa masih saja diikuti dengan TPT yang tinggi. Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh (Amrullah, Istiyani, & Musli, 2019) mengungkapkan bahwa TPT di pulau Jawa dengan rentang waktu dari 2011 sampai 2016 memang dihadapi dengan penurunan tetapi nilai tersebut masih menunjukkan bahwa pulau Jawa memberikan sumbangsiah yang besar senilai 60% hingga 65% dari total TPT di Indonesia. Pada tahun 2017 TPT pulau Jawa menempati posisi kedua tertinggi tapi nyatanya posisi tersebut menunjukkan kenaikan TPT yang mana di tahun 2016 sebesar 5.92% menjadi 6.04%. Kondisi ini menunjukkan pulau Jawa menyumbang 63.08% penduduk menganggur yang setara dengan 4.04 juta penduduk. Dimana kenaikan TPT tersebut terjadi karena mayoritas TPT di wilayah bagian barat pulau Jawa memiliki nilai yang tinggi. Pemicunya ialah masih tingginya ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan tenaga kerja dan di perparah dengan adanya ketidaksesuaian yang terjadi pada tingkat pendidikan sampai keterampilan tenaga kerja yang diinginkan para pemberi kerja serta banyaknya jumlah migran kabupaten/ kota dari provinsi berbeda yang tidak terserap di pasar tenaga kerja.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Amalia & Sari, 2019) pulau Jawa kenaikan TPT pada tahun 2017 menunjukkan DKI Jakarta 7.14%, Jawa Barat 8.22%, Jawa Tengah 4.57%, DI Yogyakarta 3.02%, Jawa Timur 4%, dan Banten 9.28% yang besarnya nilai TPT ini terjadi akibat cukup besarnya jumlah penduduk yang berada di setiap provinsi tersebut. Kondisi TPT pulau Jawa setelah tahun 2017 mengalami penurunan kembali, hingga pada tahun 2020 kembali meningkat drastis dan menjadikan pulau Jawa sebagai pulau dengan TPT tertinggi. Kenaikan TPT ini merupakan akibat dari naiknya TPT yang dialami setiap provinsi yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Dikutip dari (Juliannisa, Triwahyuningtyas, & Roswita, 2021) pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi akibat adanya kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana kebijakan tersebut memberikan dampak bagi perdagangan internasional, retail, perdagangan internasional, pengurangan investasi, hingga menciptakan kenaikan jumlah pengangguran terbuka. Melihat capaian dalam meminimalkan TPT di pulau Jawa yang belum maksimal tersebut membuat kondisi ini sangat disayangkan sekali dikala pulau Jawa dijadikan pusat perbisnisan dan pemerintahan serta menjadi pusat pembangunan yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu meminimalkan TPT.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat banyak faktor yang bermuara pada tujuan dalam mengurangi pengangguran. Adapun beberapa faktor diantaranya yaitu indeks pembangunan manusia, investasi, dan belanja pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh pada TPT, karena tiga dimensi dasar yang membentuk IPM yaitu kesehatan, pendidikan, serta pendapatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa berhasilnya pembangunan di suatu wilayah. Selaras dengan IPM, investasi juga mempengaruhi TPT. Hal ini karena semakin pemerintah berusaha menarik investor dalam dan luar negeri, semakin banyak modal yang mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah tersebut. Begitupun dengan peran pemerintah yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut, contohnya seperti penciptaan sektor produktif yang bisa menjadi lapangan pekerjaan. Apabila pengeluaran pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan individu ataupun kelompok serta tidak dimanfaatkan untuk penciptaan sektor produktif maka

pengeluaran pemerintah tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Indeks Pembangunan Manusia (Persen) Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Melihat grafik berdasarkan provinsi diatas, Banten memiliki TPT tertinggi dengan nilai IPM yang rendah. Rendahnya nilai IPM ini karena belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan serta masih rendahnya dukungan pemerintah (Ariani & Juliannisa, 2021). Provinsi Jawa Barat memiliki IPM yang rendah dibandingkan lima provinsi lainnya di pulau Jawa diikuti dengan TPT yang tinggi. Rendahnya IPM Jawa Barat ini karena adanya kesenjangan antara wilayah kota dan kabupaten terkait pembangunan manusia serta adanya program dalam pembangunan ekonomi masih berorientasi untuk menumbuhkan pertumbuhan tanpa melihat pembangunan yang berdimensi pada manusianya itu sendiri (Afandi, 2021). Keadaan ini sesuai dengan teori dimana rendahnya IPM berpengaruh pada terjadinya peningkatan TPT. Pada Provinsi DKI Jakarta meskipun memiliki IPM yang tinggi nilai TPT-nya juga tinggi hal ini menandakan adanya *gap* karena IPM tinggi tidak mampu menurunkan TPT. Tingginya IPM di DKI Jakarta karena banyaknya pembangunan yang dilakukan, tapi rendahnya daya serap hasil pembangunan yang menyebabkan kualitas kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta belum mengalami perbaikan (Rahmatulloh, 2017). Permasalahan tersebut

Charia Roswita, 2022

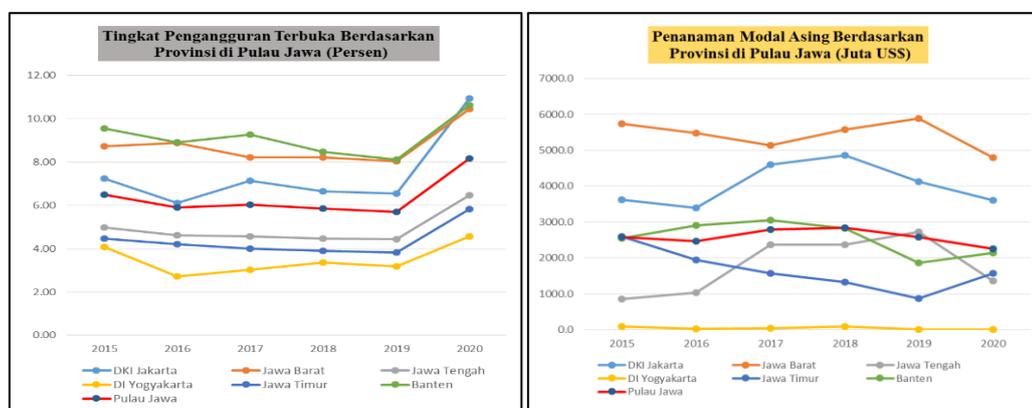
PENGARUH IPM, PMA, PMDN, DAN TOTAL BELANJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH PROVINSI DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

diperburuk dengan adanya tingkat korupsi yang tinggi (Samputra & Munandar, 2019).

Pada provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, IPM kedua provinsi ini termasuk berada di tiga besar terendah memiliki TPT yang juga berada di tiga terendah. Kondisi tersebut menandakan adanya *gap* karena secara teori harusnya upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat akan berpengaruh pada TPT itu sendiri. Pada kenyatannya IPM yang rendah dimiliki oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, TPT yang dimiliki oleh kedua provinsi tersebut pun tetap rendah. Oleh sebab itu keadaan ini menunjukkan bahwa IPM di kedua provinsi tersebut tidak berpengaruh pada TPT-nya. Adapun penyebab rendahnya IPM di Jawa Timur karena rata-rata lama sekolah hanya 7,39 tahun, usia harapan hidup yang rendah disebabkan kurangnya gizi masyarakat, serta masih kurangnya tempat pembuangan air (Perdana, 2019). Sementara itu rendahnya IPM di Jawa Tengah disebabkan karena adanya perbedaan distribusi nilai IPM antar kabupaten/ kota serta keadaan nilai IPM yang didominasi dengan IPM menengah atau kurang dari 70 (Khotimah, 2021). Sebaliknya kondisi baik dialami DI Yogyakarta dimana nilai IPM yang dimilikinya berada di posisi kedua tertinggi dan TPT yang dimilikinya merupakan TPT terendah diantara provinsi lainnya di pulau Jawa. Adapun penyebab tingginya IPM di DI Yogyakarta karena daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan yang terbilang cukup tinggi telah dipenuhi pemerintah (Samputra & Munandar, 2019).

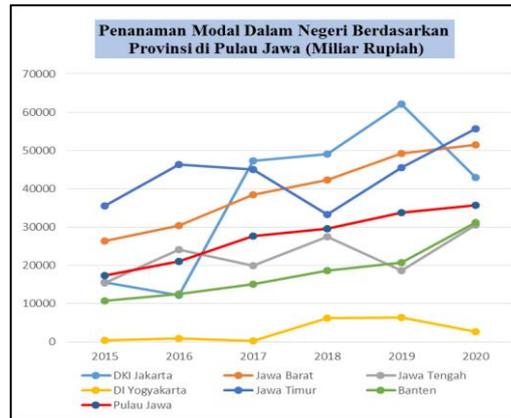
Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), Penanaman Modal Asing (Juta US\$) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah) Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Charia Roswita, 2022

PENGARUH IPM, PMA, PMDN, DAN TOTAL BELANJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH PROVINSI DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

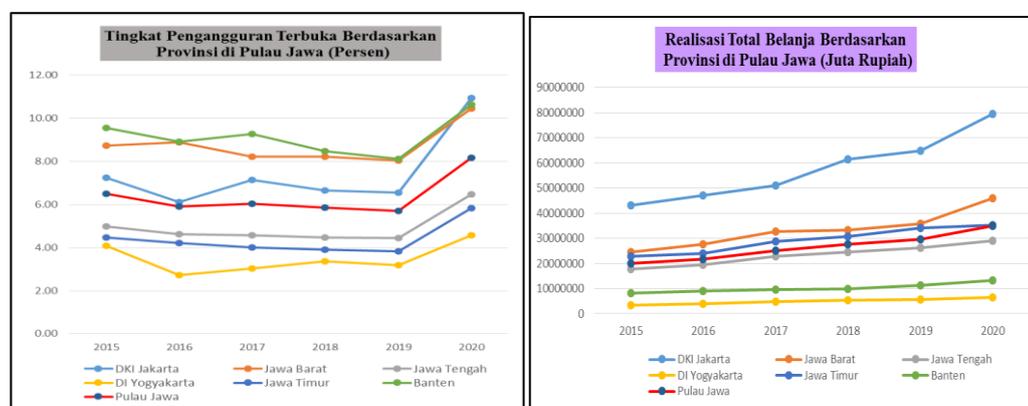


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut (Silaban & Siagian, 2021) investasi memiliki pengertian sebagai pemberian sumber dana yang tersedia sekarang yang diharapkan bisa memberikan keuntungan kedepannya. Adanya peningkatan investasi yang didorong dengan kemudahan regulasi dari pemerintah di suatu wilayah ini dapat menjadi salah satu kebijakan yang mampu menekan laju peningkatan pengangguran. Jawa Barat sebagai daerah yang memiliki PMA paling tinggi ditambah dengan PMDN yang cenderung meningkat tapi sebaliknya TPT masih saja tinggi. Penyebab TPT yang tinggi karena adanya ketimpangan realisasi investasi di daerah ibu kota provinsi dengan daerah lainnya (Fathi, 2021). Provinsi DKI Jakarta dimana PMA dan PMDN terbilang besar tapi juga masih memiliki TPT yang terbilang tinggi. Tidak efektifnya keadaan tersebut dikarenakan investasi yang lebih banyak masuk ke DKI Jakarta ialah investasi yang padat modal, bukan investasi padat karya yang mampu mengurangi angka pengangguran (Fathi, 2021). Oleh sebab itu, keadaan ini menunjukkan adanya gap dengan teori yang ada karena investasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak mempengaruhi penurunan TPT. Keadaan yang baik sesuai dengan teori investasi justru dialami oleh provinsi Jawa Timur dimana dengan PMAnya yang kecil dibantu dengan PMDN yang besar dapat menstimulus terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga TPT Jawa Timur menjadi rendah. Keberhasilan investasi tersebut khususnya PMDN merupakan wujud dari usaha pemerintah dalam memberikan jaminan serta kemampuan yang baik dalam meyakinkan investor (Soekarno, 2021).

Posisi PMA provinsi Banten cukup terbilang lebih baik daripada PMDN. Kenyataannya PMA di provinsi Banten tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja domestiknya (Saputra, Rajuni, & Sukiman, 2021). Hal tersebut menunjukkan adanya gap karena PMA tidak berpengaruh penurunan TPT. Pada provinsi DI Yogyakarta dengan PMA dan PMDN terendah menunjukkan tidak adanya dampak pada peningkatan pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori investasi dan kenyataannya karena besar atau kecil investasi yang masuk di DI Yogyakarta tidak mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada disana. Adapun penyebab rendahnya investasi di DI Yogyakarta seperti yang diutarakan Remigius Edy Waluyo selaku Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DI Yogyakarta terjadi karena harga tanah didaerah tersebut terlalu mahal sehingga investor menjadi tidak tertarik serta sulitnya birokrasi dalam mengurus perizinan lahan (Yudianto, 2021). Pencapaian dalam penurunan TPT DI Yogyakarta disampaikan oleh Sriyati selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta terjadi karena adanya peran industri kreatif, ekonomi digital serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang diserap dengan baik oleh pasar kerja (Munte, 2019). Terakhir Jawa Tengah yang mana PMA dan PMDN didaerah ini terbilang rendah tapi nyatanya mampu menekan TPT. Menurut Ketua Apindo Jateng Frans Kongi, hal tersebut terjadi karena iklim investasi di Jawa Tengah cenderung kondusif yang disebabkan adanya tenaga kerja yang loyal dan pekerja yang menjadi mitra pengusaha (Hafiyyan, 2019).

Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Total Belanja (Juta Rupiah) Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Charia Roswita, 2022

PENGARUH IPM, PMA, PMDN, DAN TOTAL BELANJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SELURUH PROVINSI DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

Pulau Jawa memiliki belanja pemerintah yang tinggi karena adanya kepadatan penduduk yang juga besar, sehingga ini menjadi tanggung jawab tersendiri untuk setiap provinsi memberikan pelayanan ke masyarakatnya (Rambe & Purmini, 2020). Keadaan DKI Jakarta dengan total belanja tertinggi dapat berpengaruh pada penurunan TPT. Kenyataannya DKI Jakarta memiliki TPT yang tinggi, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara teori. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak efektifnya keadaan tersebut yang disebabkan besarnya anggaran pegawai pemerintahan sebesar 30-40% dari total belanja. Adapun untuk masing-masing belanja modal serta belanja barang dan jasa memiliki porsi yang rendah yaitu sekitar 20% dari total belanja (Yurianto, 2020). Hal yang sama dialami provinsi Jawa Barat karena realisasi belanja daerah tertinggi kedua, namun capaian dari TPT masih saja tinggi. Hal ini dikarenakan masih besarnya belanja untuk urusan pemerintah dibanding untuk belanja modalnya (Bakar & Rahmawan, 2021). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan total belanja yang terbilang besar tapi tidak berpengaruh pada TPT nya karena pengeluaran yang besar itu tidak banyak di alokasikan pada sektor produktifnya sehingga ini menandakan gap antara teori belanja yang ada dengan kenyataannya. Disamping itu Jawa Timur yang merealisasikan belanja daerah terbilang tinggi berhasil membuat TPT-nya rendah. Keberhasilan dalam menekan TPT di daerahnya tersebut disebabkan karena sebagian dari belanja pemerintah dialokasikan untuk belanja modal yang jelas memberikan manfaat dalam pembentukan aset (Sutiono & Syafitri, 2018).

Provinsi Banten memiliki realisasi belanja daerah terendah kedua, penyebabnya yaitu belanja modal untuk pengadaan lahan kebinamargaan pada Dinas PUPR Provinsi Banten serta beberapa proyek lainnya dibidang kesehatan, pendidikan, dan perdagangan yang tidak terealisasi (Dami, 2019). Keadaan tersebut membuat belanja daerah Banten belum berpengaruh lebih pada peningkatan kesempatan kerja. Setelah itu ada DI Yogyakarta dengan total belanja daerah terendah di pulau Jawa memiliki TPT yang rendah. Adapun rendahnya realisasi pengeluaran ini dikarenakan DI Yogyakarta tidak memiliki SDA sehingga tidak memiliki dana bagi hasil, serta lambannya pemerintah dalam mengeksekusi dana yang tersedia. Oleh sebab itu kondisi di DI Yogyakarta menunjukkan adanya *gap* teori

karena rendahnya belanja daerah DI Yogyakarta tidak berdampak lebih pada capaian TPT yang dimilikinya. Keadaan yang baik juga dialami Jawa Tengah karena total belanja terbilang rendah tapi capaian TPT terbilang baik. Mengenai penyebab rendahnya belanja daerah Jawa Tengah disebabkan karena kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah yang masih rendah (Fitriyanti & Handayani, 2021). Adapun TPT yang kecil merupakan wujud dari pemerintah provinsi Jawa Tengah yang memiliki kecepatan untuk membelanjakan dana transfer daerahnya yang berarti masyarakat langsung menerima manfaat dari pembelanjaan dana yang tersedia (Intan & Yolanda, 2021). Oleh sebab itu keadaan tersebut menunjukkan bahwa belanja yang sedikit dimiliki Jawa Tengah dialokasikan sebaik mungkin untuk masyarakatnya.

Adapun beberapa penelitian yang telah melihat bagaimana pengaruh Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Total Belanja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara lain ialah Indah Mei Pratiwi, Marseto, dan Sishadiyati (2021), Putri Sari M J Silaban dan Stevi Jesika Siagian (2021), Angela Nirmala Maria Lumi, Een Novrita Walewangko, dan Agnes Lutherani Chatarina Polcarol Lapien (2021), Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yudha (2020), Elvana Astrid dan Soeharjoto Soekapdjo (2020), Nurhidayati Islamiah, Rahmatia, Muhammad Yusri Zamhuri, dan Abdul Hamid Paddu (2021), M.A.S Sridjoko Darodjatun, Zaenudin, dan Bono Prambudi (2021), Indri Arrafi Juliannisa & Tri Siswantini (2020), Ahmada Khoirul Umam & Onny Herlambang Putra Wardhana (2020), dan Ratni Heliati (2019).

Berdasarkan uraian singkat diatas membuat peneliti menjadi terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “*Pengaruh IPM, PMA, PMDN dan Total Belanja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Seluruh Provinsi di Pulau Jawa*”.

I.2 Perumusan Masalah

Pulau Jawa yang terkenal sebagai pusat perbisnisan dan pusat pemerintahan, selama enam tahun terakhir memiliki TPT yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut menandakan banyaknya

pembangunan dan sektor-sektor perekonomian di pulau Jawa masih diiringi dengan TPT yang relatif besar dibandingkan pulau lainnya. Jumlah pengangguran yang tinggi akan membutuhkan kerja keras pemerintah yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kenaikan nilai TPT di suatu wilayah bisa dipengaruhi oleh IPM, investasi yang baik berasal dari PMA dan PMDN serta total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dari uraian singkat tersebut, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh PMA terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Total Belanja terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa?

I.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan rumusan masalah tersebut didapat tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Total Belanja terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terbagi menjadi dua yaitu adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memajukan pengetahuan serta dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian kedepannya terutama mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Total Belanja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dalam memperhatikan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Total Belanja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi di pulau Jawa.

- b. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam menerapkan ilmu ekonomi peneliti khususnya dalam masalah tingkat pengangguran terbuka.